

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

Perlindungan hukum bagi pasien dibidang pelayanan medis secara perdata secara praktik dilapangan belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh pasien

Perlindungan hukum bagi pasien dibidang pelayanan medis secara perdata khususnya pemberian ganti rugi jarang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan para tenaga medis selaku pelayan kesehatan masyarakat dikarenakan pihak rumah sakit dan para tenaga kesehatan tidak ingin mengganggu rugi

Peraturan perundang-undangan yang ada sudah memberikan jaminan bagi pasien untuk mendapatkan hak ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tetapi dalam praktik dilapangan jarang dilakukan

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian ganti rugi kepada pasien akibat kesalahan atau kelalaian belum dapat dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dan para tenaga kesehatan

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut maka penulis memaparkan beberapa saran :

1. Sebaiknya ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pasien sehingga hak-hak pasien tetap terjamin
2. Sebaiknya para tenaga kesehatan menjaga dan melaksanakan profesinya dengan baik sehingga pelayanan kesehatan bagi pasien atau masyarakat secara luas dapat diterima dengan baik tanpa harus merugikan para pasien.
3. Sebaiknya pemerintah harus selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebaiknya di setiap Rumah Sakit ada suatu lembaga pengaduan untuk mengaduan setiap tindakan pata tenaga kesehatan yang merugikan pihak pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta.
- Dalmy Iskandar, 1998, *RS, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Freddy Tengker, 2008, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung.
- Herman Hadiati K., 2002, *Hukum Perumahsakitan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kansil, CST, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Lementa Benyanim, 1989, *Pelayanan Medis, Citra , Konflik, dan Harapan*, Kanisius, Yogyakarta
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.
- Siti Ismiaji J., 2006, *Tanggung jawab Perdata didalam Pelayanan Medis : Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materiil*, Voleme, Yogyakarta
- Soejono Soekarno, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Veronika Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wila Chandrawila S., 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengganti semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan DVG.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Artikel

Suara Pembaharuan, 2003, Malpraktik yang dilakukan Dokter, 9 Desember 2003.

Website

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=10135>, Tidak Hati-Hati Tangahi Pasien, RS Pondok Indah Harus Bayar Dua Miliar

